

	News Title : Bappepti Resmi Blokir 1.327 Situs Web Ilegal Perdagangan Komoditi	
	Media Name : law-justice.co	Journalist : Gisella Putri
	Publish Date : 16 August 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappepti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Home > Bisnis

Bappepti Resmi Blokir 1.327 Situs Web Ilegal Perdagangan Komoditi

Rabu, 16/08/2023 14:42 WIB



Bappepti (Net)

Jakarta, law-justice.co - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) resmi memblokir 1.327 domain situs web ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada periode Januari-Agustus 2023.

Kepala Bappepti Didid Noordiatmoko menjelaskan langkah tersebut diambil sebagai upaya strategis pemerintah dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang BPK.

Baca juga : [Lowongan Kerja CBP Sukses Makmur, Ini Syarat dan Ketentuannya](#)

"Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujarnya dalam siaran pers, Rabu 16 Agustus 2023.

Lebih lanjut, pihaknya meminta entitas-entitas ilegal yang telah di blokir tersebut segera mengajukan permohonan perizinan kepada Bappepti dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendapatkan izin, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir.

Baca juga : [Yenny Wahid dan Kualitas Politiknnya](#)

Selain itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappepti. Berikutnya, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappepti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappepti, Bappepti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Aldison.

Baca juga : [DPR : Peningkatan Dana Desa Menjadi Dua Kali Lipat akan Segera Dibahas](#)

Aldison juga mengimbau kepada entitas ilegal di bidang PBK untuk mengajukan permohonan perizinan kepada Bappepti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, kepada masyarakat, Bappepti tidak akan lelah mengimbau agar lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

Aldison meminta masyarakat untuk selalu bisa memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan jangan sampai mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, periksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappepti," pungkask Aldison.